



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 2464/PL4.7.1/KP.11.00/2024

Tentang

**PENGISIAN FORM PENDATAAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Yth. **Seluruh Pegawai (PNS, PPPK DAN Non ASN)**
Politeknik Negeri Semarang

Berdasarkan surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor 14906/A3/KP.11.00/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal Permintaan Data Kepesertaan Jaminan Sosial, diberitahukan kepada **Seluruh Pegawai Politeknik Negeri Semarang** untuk mengisi form pendataan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui tautan <https://bit.ly/4bypD2Y> paling lambat tanggal 22 Mei 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi narahubung di nomor berikut +6281315093791 (Andi).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 20 Mei 2024
Pn. Direktur,

Dr. KARNOWAHADI, S.E., M.M
NIP. 196404141990031002



LEMBAR DISPOSISI

NO. DISPOSISI :

140
20/5/24

K/S/B/R	
Kode :	Tgl. Surat masuk :
Masalah :	17/5/2024
Perihal : Permintaan Data Kepesertaan Jaminan Sosial	
Tanggal : 16.5.2024	Tgl. Penyelesaian :
Nomor : 14906	
Asal : KEMENDIKBUDKOTEK	
DISPOSISI / INSTRUKSI :	Diteruskan kepada :
<p>yth. WDZ mohon, ditindaklanjuti Plt. Dir 17/5/24</p> <p>yth. Kepegawaian mohon di-share ke seluruh pegawai WDZ 17/5/24</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plt. Dir . 2. WDZ 3. Kepegawaian 4. 5.
K = Kilat, S = Segera, B = Biasa, R = Rahasia	

CATATAN :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

140
20/23
5

Nomor : 14906/A3/KP.11.00/2024
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Data Kepesertaan Jaminan Sosial

16 Mei 2024

Yth. Pimpinan Unit Kerja (Daftar Terlampir)

Berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang kesinergian penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor PER/192/062023, Nomor 06/VI/PKS/2023, dan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang kesinergian penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 274/KTR/0623, Nomor 07/VI/PKS/2023, bersama ini kami memohon kesediaan Saudara menugasi seluruh pegawai di Satuan Kerja Bapak/Ibu (PNS, PPPK, dan Non ASN) untuk mengisi form pendataan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui tautan <https://bit.ly/4bypD2Y> paling lambat tanggal 22 Mei 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi narahubung kami, Saudara Andi pada nomor +62 813 1509 3791.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Ambar Musyarifah
NIP 197709072003122002



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran

Nomor : 14906/A3/KP.11.00/2024

Tanggal : 16 Mei 2024

1. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
2. Kepala Biro Hukum
3. Plh. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
6. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
7. Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
8. Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
9. Kepala Pusat Prestasi Nasional
10. Kepala Pusat Penguatan Karakter
11. Plt. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
12. Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
14. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
17. Sekretaris Inspektorat Jenderal
18. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
19. Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
20. Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru
21. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
22. Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
23. Direktur Guru Pendidikan Dasar
24. Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
25. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
26. Direktur Sekolah Dasar
27. Plt. Direktur Sekolah Menengah Pertama
28. Direktur Sekolah Menengah Atas
29. Plt. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
30. Plt. Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
31. Direktur Kursus dan Pelatihan
32. Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
33. Plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi
34. Plt. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
35. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
36. Direktur Kelembagaan
37. Plt. Direktur Sumber Daya
38. Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
39. Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
40. Direktur Perfilman, Musik, dan Media
41. Direktur Pelindungan Kebudayaan
42. Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
43. Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
44. Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara
45. Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat
46. Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah
47. Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

48. Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi D.I. Yogyakarta
49. Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan
50. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat
51. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi
52. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan
53. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh
54. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung
55. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten
56. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bali
57. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat
58. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur
59. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat
60. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur
61. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan
62. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah
63. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara
64. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara
65. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah
66. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Barat
67. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Riau
68. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau
69. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
70. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Utara
71. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo
72. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku
73. Plt. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara
74. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu
75. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua
76. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat
77. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
78. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat
79. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
80. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur
81. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
82. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh
83. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
84. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
85. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu
86. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi
87. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
88. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung
89. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten
90. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
91. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
92. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali
93. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat
94. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur
95. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
96. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
97. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
98. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
99. Plt. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
100. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
101. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara



102. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
103. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat
104. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo
105. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku
106. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara
107. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua
108. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat
109. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau
110. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
111. Kepala BBPPMPV Seni dan Budaya
112. Kepala BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik
113. Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
114. Kepala BBPPMPV Pertanian
115. Plt. Kepala BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri
116. Kepala BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika
117. Kepala BBPPMPV Bidang Kelautan, Perikanan, dan TIK
118. Plt. Kepala Museum dan Cagar Budaya
119. Kepala Balai Media Kebudayaan
120. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I
121. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II
122. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
123. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV
124. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V
125. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI
126. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII
127. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII
128. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX
129. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X
130. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI
131. Plt. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII
132. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII
133. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV
134. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
135. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI
136. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII
137. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII
138. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX
139. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX
140. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI
141. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII
142. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXIII
143. Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi
144. Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
145. Plt. Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia
146. Kepala Balai Layanan Platform Teknologi
147. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh
148. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara
149. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat
150. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
151. Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau
152. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
153. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
154. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
155. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat



156. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat
157. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
158. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
159. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara
160. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
161. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah
162. Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali
163. Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua
164. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
165. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
166. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi
167. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung
168. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
169. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten
170. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
171. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
172. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
173. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
174. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara
175. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku
176. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur
177. Rektor Universitas Gadjah Mada
178. Rektor Universitas Indonesia
179. Rektor Universitas Airlangga
180. Rektor Universitas Hasanuddin
181. Rektor Universitas Sumatera Utara
182. Rektor Universitas Diponegoro
183. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
184. Rektor Universitas Sriwijaya
185. Rektor Universitas Brawijaya
186. Rektor Universitas Syiah Kuala
187. Rektor Universitas Sam Ratulangi
188. Rektor Universitas Pattimura
189. Rektor Universitas Udayana
190. Rektor Universitas Nusa Cendana
191. Rektor Universitas Andalas
192. Rektor Universitas Mulawaraman
193. Rektor Universitas Mataram
194. Rektor Universitas Riau
195. Rektor Universitas Cenderawasih
196. Rektor Universitas Jambi
197. Rektor Universitas Tanjungpura
198. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
199. Rektor Universitas Palangka Raya
200. Rektor Universitas Jember
201. Rektor Universitas Lampung
202. Rektor Universitas Sebelas Maret
203. Rektor Universitas Tadulako
204. Rektor Universitas Halu Oleo
205. Rektor Universitas Bengkulu
206. Rektor Universitas Terbuka
207. Rektor Universitas Negeri Medan
208. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
209. Rektor Universitas Negeri Padang



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

210. Rektor Universitas Negeri Makassar
211. Rektor Universitas Negeri Semarang
212. Rektor Universitas Negeri Surabaya
213. Rektor Universitas Negeri Jakarta
214. Rektor Universitas Negeri Manado
215. Rektor Universitas Negeri Papua
216. Rektor Universitas Negeri Malang
217. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
218. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
219. Rektor Universitas Khairun
220. Rektor Universitas Malikussaleh
221. Rektor Universitas Trunojoyo Madura
222. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
223. Rektor Universitas Bangka Belitung
224. Rektor Universitas Musamus
225. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
226. Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka
227. Rektor Universitas Tidar
228. Rektor Universitas Siliwangi
229. Rektor Universitas Teuku Umar
230. Rektor Universitas Timor
231. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
232. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
233. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
234. Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang
235. Rektor Universitas Samudra
236. Rektor Universitas Sulawesi Barat
237. Rektor Institut Teknologi Bandung
238. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
239. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
240. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
241. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
242. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar
243. Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
244. Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang
245. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
246. Rektor Institut Teknologi Sumatera
247. Rektor Institut Teknologi Kalimantan
248. Rektor Institut Pertanian Bogor
249. Direktur Politeknik Negeri Bandung
250. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
251. Direktur Politeknik Negeri Lampung
252. Direktur Politeknik Negeri Jember
253. Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
254. Direktur Politeknik Negeri Kupang
255. Direktur Politeknik Manufaktur Bandung
256. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
257. Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
258. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
259. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
260. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual
261. Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
262. Direktur Politeknik Negeri Jakarta
263. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara



264. Plt. Direktur Politeknik Negeri Semarang
265. Direktur Politeknik Negeri Subang
266. Plt. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
267. Direktur Politeknik Negeri Manado
268. Direktur Politeknik Negeri Ambon
269. Direktur Politeknik Negeri Pontianak
270. Direktur Politeknik Negeri Malang
271. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
272. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
273. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
274. Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta
275. Direktur Politeknik Negeri Batam
276. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis
277. Direktur Politeknik Negeri Balikpapan
278. Direktur Politeknik Negeri Madiun
279. Direktur Politeknik Negeri Madura
280. Direktur Politeknik Negeri Fakfak
281. Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
282. Direktur Politeknik Negeri Sambas
283. Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia
284. Direktur Politeknik Negeri Ketapang
285. Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut
286. Direktur Politeknik Negeri Indramayu
287. Direktur Politeknik Negeri Cilacap
288. Direktur Politeknik Negeri Nunukan
289. Direktur Politeknik Negeri Medan
290. Direktur Politeknik Negeri Samarinda
291. Direktur Politeknik Negeri Bali
292. Direktur Politeknik Negeri Padang
293. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan
294. Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
295. Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
296. Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
297. Direktur Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta
298. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
299. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
300. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
301. Plh. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
302. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
303. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
304. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
305. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
306. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
307. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
308. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
309. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
310. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
311. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV
312. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
313. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
314. Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII

